

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
(STUDI KASUS PELABUHAN PENYEBRANGAN CABANG SAPE)**

***IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) AT
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
(CASE STUDY OF THE SAPE BRANCH CROSSING PORT)***



OLEH :

**DAHNIAR MANDALIA
NIM 217110128**

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
(STUDI KASUS PELABUHAN PENYEBRANGAN CABANG SAPE)

Oleh :

DAHNIAR MANDALIA


Untuk memenuhi Ujian Sidang Skripsi
Tanggal 14 Juli 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si
NIDN. 0815118302

Pembimbing II


M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP
NIDN. 0804049501

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
(STUDI KASUS PELABUHAN PENYEBRANGAN CABANG SAPE)

Oleh:

DAHNIAR MANDALIA
NIM.217110128

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 juli 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si**
NIDN.0815118302

Ketua

2. **M. APRIAN JAILANI, S.AP., M.AP**
NIDN.0804049501

Anggota

3. **Drs. H. Mustamin H. Idris, MS**
NIDN.0031126484

Anggota

KETUA PROGRAM ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

vRahmad hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditukis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram , 14 juli 2021



DAHNIAR MANDALIA
NIM. 217110128



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahniar Mandalis
NIM : 217 110 128
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 23 April 2000
Program Studi : Ilmu Administrasi publik
Fakultas : PISPOL
No. Hp/Email : 082 339 542 759 / nhiarmandalis99@gmail.com
Judul Penelitian : -

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT. ASDP
Indonesia Ferry (persero) (studi kasus pelabuhan penyebrangan cabang sepe)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Penulis



Dahniar Mandalis

NIM. 217 110 128

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahniar Mandalis
NIM : 217 110 128
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 23 April 2000
Program Studi : Ilmu Administrasi publik
Fakultas : PSIPOL
No. Hp/Email : 082 339 592 759 / nhiar.mandalis99@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT. ASDP Indonesia perry (persero) (Studi kasus pelabuhan penyebrangan Calbong Sope)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Penulis



Dahniar Mandalis
NIM. 217 110 128

Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah tetap belajar dan tak kenal putus asa”

“Menunda skripsimu sama halnya menunda senyum orang tuamu”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Alm. Ayah ku Lukman M. Amin dan ibu ku Marliah yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang telah banyak memberikan motivasi terbesar dalam hidupku yang tak pernah lelah mendoakan, semua pengorbanan dan kesabarannya mengantarku sampai saat ini serta dukungan penuh dalam hidupku. Terimakasih atas doa yang kalian panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaan anak semata wayangmu.
2. Terimakasih untuk keluarga besar yang tak bisa saya sebut satu persatu yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Terimakasih untuk sahabat seperjuanganku Rahmawati, Nur Wulandari, Melati Putri, Hikmawati, faturahmah dan kak linda rahmawati yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih untuk semua waktu, kenangan, dan bantuannya selama ditanah rantuan.
4. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan jurusan administrasi publik angkatan 2017.
5. Terimakasih untuk kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) (STUDI KASUS PELABUHAN PENYEBRANGAN CABANG SAPE)

OLEH :

DAHNIAR MANDALIA

NIM. 217110128

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang sistem nilai menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. *Good Corporate Governance* memiliki beberapa prinsip antara lain *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (keadilan atau kewajaran). Pada pelaksanaannya *good corporate governance* pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero cabang sape menemui permasalahan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum merata dan keterlibatan masyarakat, swasta dan pemerintah dalam Implementasi *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Sape dan menganalisis keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero cabang sape belum berjalan secara maksimal dan efektif karna masih ada yang harus dibenahi dari pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi *Good Corporate Governance* sejauh ini membawa pengaruh positif dan memberikan kontribusi yang baik antara pemerintah dan swasta dan sebaliknya serta swasta dengan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, *Good Corporate Governance*, PT. ASDP

ABSTRACT

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IMPLEMENTATION IN
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
(A CASE STUDY AT THE CROSSING PORT OF SAPE, BIMA)**

BY:

DAHNIAR MANDALIA
NIM. 217110128

Good corporate governance is defined as a value system that serves as a baseline for a company's capacity to carry out its operational activities while maintaining stakeholder trust. Transparency (openness of information), accountability, responsibility, independence, and fairness are all principles of good corporate governance. At the PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Sape branch, challenges such as uneven Corporate Social Responsibility (CSR) and community, private, and government involvement in the execution of Good Corporate Governance were experienced. The purpose of this study is to assess the extent to which Good Corporate Governance is being implemented at PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Sape Branch, as well as government and community involvement. Edward III's implementation theory is used in this research. The data for this study was gathered through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of Good Corporate Governance at PT. ASDP Indonesia Ferry Persero sape branch has not run optimally and effectively. It is because there are still issues that need to be addressed from the implementation of Good Corporate Governance principles and the involvement of the government, private sector, and community in the implementation of Good Corporate Governance has had a positive influence and made a good contribution between the government and private sector and vice versa, as well as private sector with the community.

Keywords: Implementation, Good Corporate Governance, PT. ASDP



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah pada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas dan kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Studi Kasus Pelabuhan Penyebrangan Cabang Sape)”. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan dan tuntutan tuhan yang maha esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Beserta Jajarannya.
3. Bapak Rahmad Hidayat S.AP.,M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Siti atika rahmi, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak M. Aprian Jailani, S.AP.,M.AP selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

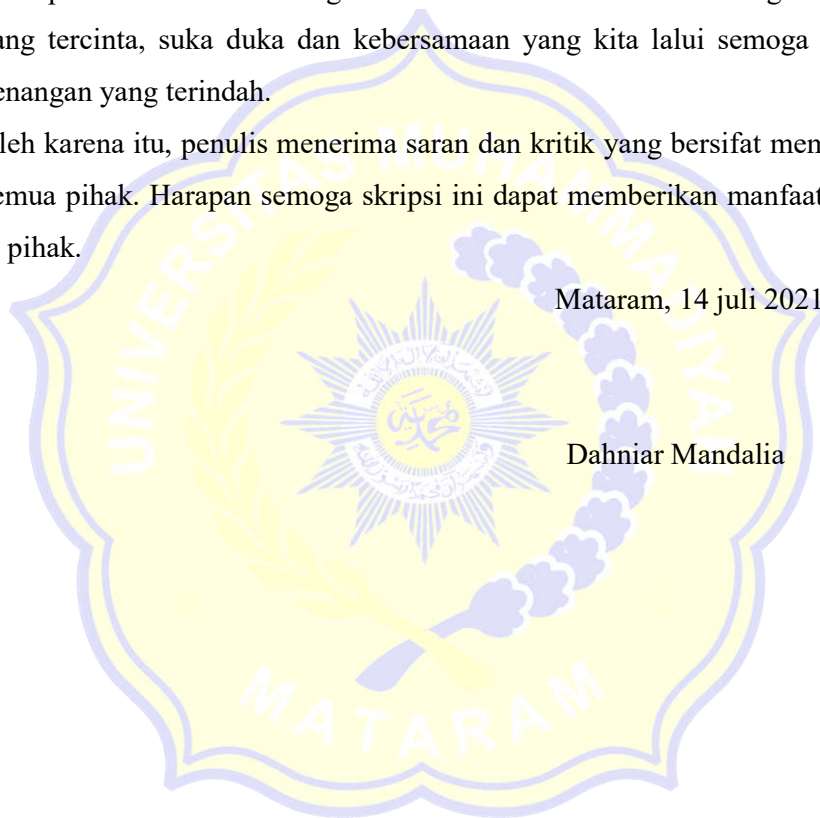
7. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape yang telah membantu peneliti dalam penyediaan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2017 yang tercinta, suka duka dan kebersamaan yang kita lalui semoga menjadi kenangan yang terindah.

Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Mataram, 14 juli 2021

Dahniar Mandalia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISONALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.2.3 Konsep <i>Good Governance</i>	16
2.2.4 Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.3 Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
3.4 Pemilihan Informan/Sumber.....	24
3.5 Sumber Dan Jenis Data	24
3.6 Tehnik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Gambaran Umum PT. ASDP (Persero) Cabang Sape	31
4.1.2 Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> PT. ASDP Sape.....	35
4.1.3 Keterlibatan Pemerintah, Masyarakat Dan Swasta Implementasi GCG PT. ASDP cabang sape.....	45
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> PT. ASDP Sape.....	51
4.2.2 Keterlibatan Pemerintah, Masyarakat Dan Swasta Implementasi GCG PT. ASDP cabang sape	61
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Pemilihan Informan Penelitian	24
Table 4.1 jumlah karyawan PT. ASDP Sape	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. ASDP (Persero) Cabang Sape.....	33
Gambar 4.2 Pedoman GCG Pada Website PT. ASDP	37
Gambar 4.3 Pembelian Tiket Kapal Pada PT. ASDP (Persero).....	37



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Dokumentasi
LAMPIRAN 2	Lembar Konsultasi Skripsi
LAMPIRAN 3	Peraturan-Peraturan <i>Good Corporate Governance</i>
LAMPIRAN 4	Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah ruah buat dikelola sumberdaya alam tersebut, hingga pemerintah mendirikan Badan Usaha milik negara (BUMN) yang dalam naungan kekuasaan kementerian BUMN. BUMN dituntut mampu kelola sumber daya alam Indonesia sehingga bisa mengembangkan keunggulan sumberdaya alam hingga mampu berikan kualitas pelayanan terbaik untuk rakyat. Sebab itu BUMN membutuhkan sistem yang efektif dan efisein, karna sistem tersebut ialah landasan bagi bumn dalam melaksanakan usahanya kemudian bisa diberikan pelayanan secara optimal untuk masyarakat.

Dikemukakan dalam buku Ibrahim R. (1997: 117) BUMN diterangkan sebagai badan usaha milik negara yang tidak semuanya milik negara akan tetapi kapasitasnya disetarakan pada kategorisasi diantara lain: a) usaha bersifat bertugas memandu pembangunan prasarana tertentu. b) menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan serta rahasia harus dipegang negara. c) dibentuk dalam peninjauan strategis kebijakan pemerintah. d) didirikan dengan tujuan perlindungan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. e) dibuat berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku harus dikelola pihak pemerintah. f) usaha bersifat menguntungkan serta manfaatnya dilaksanakan pihak swasta.

Undang-undang negara republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 1 ayat (1) menerangkan pendapat badan usaha milik negara

sebagaimana badan usaha sebagian besar modalnya dimiliki pihak negara dengan penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang terpisah. Kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dijadikan modal kepada BUMN yang tidak dikelola berdasarkan prosedur APBN melainkan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa BUMN ada dua bagian yaitu, Persero dengan tujuan mengembangkan keuntungan melalui taat terhadap peraturan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sementara itu BUMN didirikan oleh pemerintah dengan melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah untuk mengadakan barang dan jasa tersebut guna terpenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan perseroan hampir seluruh perusahaan milik negara berbentuk perseroan. Misalnya PT. Pos Indonesia, PT. PLN, PT. Telkom, PT. Pelni, PT. Garuda Indonesia Airways, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Aneka tambang, PT. KAI dan lainnya.

PT ASDP Indonesia Ferry Persero ialah badan usaha milik negara yang di bidang jasa kepelabuhan angkutan laut penyebrangan, jasa Charter kapal, dermaga dan sarana lain, perdagangan dalam negeri dan sarana prasarana yang terkait dengan penyebrangan. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yaitu perusahaan jasa angkutan dan mengelola pelabuhan penyebrangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan adalah menyiapkan akses transportasi antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau besar dan menyediakan akses transportasi di wilayah yang belum terjangkau penyebrangan guna mempercepat pembangunan. Pelabuhan penyebrangan Sape terletak di kabupaten Bima ujung

timur pulau Sumbawa berada di provinsi nusa tenggara barat (NTB) Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) penyebrangan cabang sape merupakan pengelolaan pelabuhan penyeberangan sape-labuhan Bajo dan sape-waikelo.

Faktor utama pendapatan pelabuhan yaitu penerimaan dari jasa pelabuhan untuk kapal barang dan pelayanan lain yang telah sediakan pihak pengelola pelabuhan. Peran pelabuhan penyeberangan Ferry sape sangat strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan daerah sape baik dilihat dari aspek ekonomi dan sosial.

Tujuan didirikan PT ASDP untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional, terutama dalam bidang pengelolaan jasa angkutan penyeberangan, jasa dermaga, jasa angkutan laut serta perdagangan dalam negeri.

Perseroan umumnya memiliki konsep pekerjaan yang sama, meningkatkan keuntungan dan mewujudkan nilai bagi para stakeholder dan pemegang saham selaku upaya pencapaian konsep kegiatan yang ada, perusahaan akan konsisten berupaya meningkatkan kinerja para pekerja dan semua perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan yang berhasil akan berimbas pada keuntungan yang didapatkan dan meningkatnya penilaian perusahaan di mata penanam modal. Strategi dalam meningkatkan kinerja efisiensi dan profesionalisme lalu adanya prinsip yang dipercaya dapat mendukung proses peningkatan kinerja dari perusahaan, prinsip tersebut yaitu prinsip Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Good Corporate Governance dibuat melalui Keputusan Menteri BUMN No.117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penerapan GCG pada BUMN yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Lantas keterkaitan yang diatas, pada pasal 5 prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran. Implementasi Good Corporate Governance yang baik akan bermanfaat dalam meningkatkan potensi perusahaan dengan terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan kemampuan dan operasional perusahaan serta mengoptimalkan pelayanan kepada pemilik saham (Izzati dan Sularto, 2008, h.2).

Namun pada kenyataannya pelaksanaan GCG di BUMN belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan adanya permasalahan baik secara internal maupun eksternal yang berdampak kepada kinerja dari BUMN tersebut. Oleh sebab itu sudah seharusnya BUMN terapkan GCG dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaannya. Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam pelayanan penyediaan transportasi ialah faktor terpenting untuk menunjang kegiatan perdagangan di Indonesia.

Setiap perseroan pasti memiliki visi misinya Masing-masing. Dimana visi misi menjadi patokan akan keberhasilan suatu perusahaan Tersebut. Untuk mencapai visi dan misinya, persero perlu menerapkan good corporate governance (GCG) sebagaimana yang diperlukan seluruh perusahaan. Peraturan tersebut tentang peraturan menteri negara badan usaha milik negara

nomor:PER01/MBU/2011 pada tanggal 01 agustus 2011 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.

Menurut Khafifah (2016:3), Good Corporate Governance ialah tata kelola yang diselenggarakan melalui pertimbangan faktor yang berpengaruh proses institusional termasuk faktor yang terkait fungsi regulatornya. Target utama implementasi GCG yaitu tercapainya optimalisasi kinerja para pegawai untuk bisa meningkatkan kemampuan kerja organisasi, maka kepentingan manajemen dan karyawan haruslah seimbang dan menyesuaikan posisi masing-masing. Implementasi Good Corporate Governance diharapkan mampu membawa kearah yang positif bagi pelaku usaha, termasuk pihak internal operasional perusahaan.

Menurut Effendi (2009:73), implementasi Good Corporate Governance ditentukan untuk peningkatan kinerja atau mempertahankan kemampuan kerja yang telah dicapai. Manfaatnya berdasarkan di perusahaan yang mempraktikan Good Corporate Governance yaitu terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat Good Corporate Governance sebenarnya akan tampak dalam jangka panjang dalam bentuk trend kinerja perusahaan yang tinggi (high performance) serta citra perusahaan yang baik. Hal tersebut hanya akan tercapai jika ada pembenahan pada tiap pegawai yang sebelumnya kinerjanya buruk atau kurang memuaskan. Pada kenyataannya, penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan khususnya di Indonesia masih relatif rendah, maka tidak heran jika perusahaan di Indonesia umumnya belum dapat berkembang dengan maksimal secara kualitas.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini didukung oleh pendapat Kaihatu (2006:3), mengatakan bahwa BUMN ialah pelaku utama dalam ekonomi Indonesia. Prinsip Good Corporate Governance yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, memprioritaskan BUMN dengan terapkan GCG secara konsisten prinsip good corporate governance untuk landasan operasioanalnya. Tujuanya untuk meningkatkan hasil usaha dan tanggung jawab perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, 2011).

Adanya kendala dalam pelaksanaan good corporate governance di Indonesia antara lain kendala di bidang hukum, sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu adanya suatu upaya kolektif dari berbagai pelaku bisnis termasuk regulator, akuntan, dewan komisaris dan lainnya untuk sosialisasi dan pentingnya Good corporate governance kemudian timbulnya kesadaran akan pentingnya good corporate governance bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan perusahaan.

Dari pemaparan di atas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) penyeberangan cabang sape, terdapat

masalah utama yaitu kesulitan mencapai target yang sudah ditetapkan sesuai rencana kerja cabang dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan *good corporate governance* di PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang sape, antara lain sebagai berikut :

Pertama, alokasi *corporate social responsibility* (CSR) belum merata untuk masyarakat sekitar pelabuhan penyeberangan sape. Dikatakan bentuk pertanggung jawab belum merata karena berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa prinsip daripada *good corporate governance*, *Corporate social responsibility* ada 3 aspek secara umum tanggung jawabnya yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Aspek ekonomi dalam hal ini bisa dilihat misalnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya dengan memberikan peluang bisnis agar lebih kreatif dan inovatif contoh dengan member ijin buka kantin di area PT. ASDP cabang Sape atau di kantin kapal yang beroperasi di PT. ASDP cabang Sape.

Sedangkan di aspek sosial misalnya pemberdayaan sumber daya manusia disekitar lingkungan perusahaan dengan cara merekrut karyawan atau membuka lowongan kerja sebagai karyawan tetap di PT. ASDP penyebrangan cabang sape atau dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana umum misalnya merenovasi musholla yang ada di area PT. ASDP Cabang Sape. Dan aspek lingkungan, bisa dilihat bahwa kurang kondusif ketentraman dan kenyamanan disekitar area PT. ASDP sape dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kebisingan maupun polusi udara disekitar PT. ASDP Cabang sape.

Dengan adanya permasalahan ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yopi zariansah (2019) dengan judul “Analisis Corporate Social Responsibility Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo) Belawan“ dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan corporate social responsibility PT. Pelindo 1 Belawan terdapat melakukan kegiatan sosial tetapi sepenuhnya belum optimal dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan menurut peneliti proses penelitian ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang mendukung dengan adanya *corporate social responsibility* belum merata atau optimal dalam implementasinya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* yaitu suatu komitmen dari persero untuk melakukan etika perusahaan dan kontribusinya pada pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu implementasi prinsip *Good corporate governance* di perusahaan adalah penetapan *corporate social responsibility*, salah satu prinsip Good Corporate Governance di perusahaan adalah masalah pertanggungjawaban. Undang-undang no.40 tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang tersebut membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

Kedua, yaitu adanya keterlibatan tiga pihak yaitu pemerintah, swasta serta masyarakat dalam implementasi good corporate governance di PT. ASDP

Indonesia Ferry (Persero) Penyebrangan Cabang Sape. Dikemukakan keterlibatan tiga pihak tersebut karena ditemukan besarnya peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat dan pengaruh dari ketiga pihak tersebut dalam menunjang implementasi good corporate governance yang baik. Berdasarkan observasi penelitian yang telah dilakukan, dari ketiga pihak yang terlibat peran masyarakat yang masih kurang dalam mengikutsertakan implementasi good corporate governance di PT ASDP Indonesia ferry cabang sape. Dikatakan masih kurangnya peran masyarakat karena koordinasi atau kerjasama diantara stakeholders nya belum merata secara menyeluruh, hanya saja dibagian yang memang memiliki kepentingan khusus saja.

Menurut observasi selama penelitian, keterlibatan pemerintah sudah cukup dominan sejauh ini karena pemerintah mendasari aturan hukum mengacu pada penguatan regulasi, evaluasi kebijakan dan memperkuat ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan melalui awalnya komunikasi atau penguatan kemitraan dengan masyarakat.

Dalam keterlibatan pemerintah dapat secara langsung mengikut sertakan urusan perusahaan sebagai stakeholders. Dalam memaknai keterlibatan 3 pihak yaitu pemerintah yang berperan menciptakan penyelenggara hukum yang kondusif, pihak swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta keterlibatan masyarakat mendorong interaksi sosial ekonomi masyarakat berpartisipasi dalam good corporate governance.

Sehubungan dengan hal itu menyebabkan peneliti sangat tertarik melakukan penelitian mendalam dengan judul “**Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero Penyebrangan Cabang Sape**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Penyebrangan Cabang Sape ?
2. Bagaimana keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Penyebrangan Cabang Sape ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas. Selanjutnya dapatlah ditetapkan tujuan penelitian, sebagai berikut :

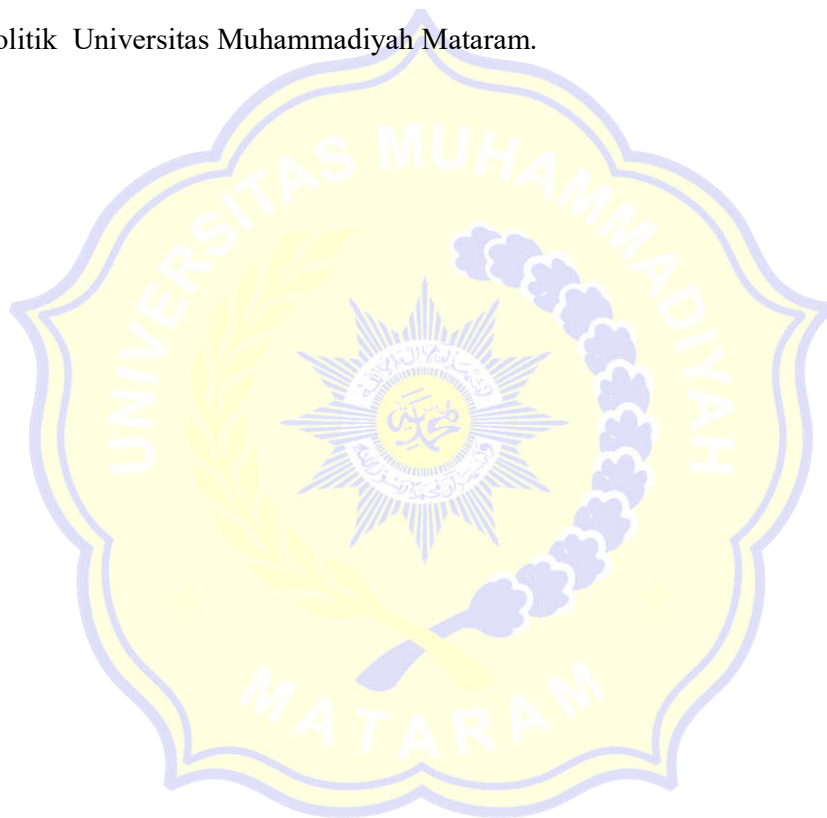
1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *good corporate governance* pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) penyebrangan cabang sape.
2. Untuk mengetahui keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi *good corporate governance* (GCG) pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero penyebrangan cabang sape.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bahwa hasil penelitian ini nanti di harapkan bisa bermanfaat dalam memberikan pengetahuan pada pembaca terkait implementasi *good corporate governance* (GCG) pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero penyebrangan cabang sape.

2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat dan masukan bagi PT. ASDP Indonesia Ferry persero penyebrangan cabang sape terkait implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sape.

3. Sebagai Persyaratan Untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Rizki Novita Sari, Mochammad AlMusadieg, dan Muhammad CahyoWidyo Sulistyoy(2018), Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero).	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah diterapkan dengan sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan diwujudkan setiap prinsip dari Good Corporate Governance di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). mulai dari prinsip transparancy (keterbukaan informasi), prinsip accountability (akuntabilitas), Prinsip responsibility (pertanggungjawaban), Prinsip independency (kemandirian) Prinsip yang terakhir yaitu prinsip fairness (keadilan atau kesetaraan), diwujudkan dengan adanya code of conduct (etika perusahaan) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).	Persamaan terletak pada implementasi <i>Good Corporate Governance</i> , Perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitian
2.	Yopizariansah (2019), Analisis corporate social responsibility pada PT. pelabuhan Indonesia 1 (PELINDO 1) belawan.	Kualitatif	Tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ditemukan bahwa pengaturan corporate social responsibility diatur dalam undang-undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 15, UU no.19 tahun 2003 tentang bumh pasal 2 ayat (1),dalam UU no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 74. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa mengimplementasikan corporate social responsibility (CSR) PT. PELINDO 1 Belawan terdapat melakukan kegiatan sosial tetapi belum optimal sepenuhnya dalam melaksanakan tanggung jawab	Persamaan terletak pada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan undang-undang yang diatur. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan

			sosial perusahaan.	
3.	Elin Nur Islamiah (2019), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT.Asdp Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak.	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance sudah diterapkan secara maksimal dan komitmen penerapan good corporate governance dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara kesinambungan tingkatnya sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di PT ASDP cabang merak serta transparansi yang berupa informasi ketersediaan perusahaan pada PT ASDP Indonesia Ferry cabang merak sudah cukup transparan mengingat semua informasi perusahaan secara internal maupun eksternal perusahaan sudah dipublikasikan secara terperinci.	Persamaan terletak pada implementasi <i>Good Corporate Governance</i> , Perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitian

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Pressman & wildavsky dalam buku Erwan & Dyah (2012:20) sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadanya. Menurut mereka, implementasi memaknai dengan beberapa kata kunci untuk menjalankan kebijakan , untuk memenuhi janji-janji dalam dokumen kebijakan dan menghasilkan output dalam tujuan kebijakan dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu : Van meter & Van horn (1975) dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai" tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"

Sedangkan Lester & Stewart jr. (2000:104) dalam Agustino (2008:139) juga mengatakan bahwa "implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih".

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Adapun model implementasi dari George C. Edward III (1980) dalam subarsono (2005) mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (sop). Sop menjadi pedoman bagi setiap implemtator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2.3 Konsep Good Governance

Konsep Good governance mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil yang saling menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan disuatu negara. Tanpa good governance Sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah, korporasi dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menurut leach & percy-smith (dalam Mardoto,2009:17), governance meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan "yang diperintah" karena kita semua adalah bagian dari proses governance. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna tersebut yakni "*the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning publik life, economic and social development.*" Atau dengan kata lain bahwa

governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor - aktor lain diluar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari civil Society.

2.2.4 Konsep Good Corporate Governance

Definisi menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN : “Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan Nilai Pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Definisi menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(Good Corporate Governance) pada BUMN: “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan sudut pandang

dalam pengertian luas (*broad view*). Dalam sudut pandang yang sempit, *Good Corporate Governance* (GCG) diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sebagai *a web of relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (*stakeholders*) lain yaitu : karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainnya.

Konsep Good Corporate Governance menurut UU BUMN terdapat dalam poin IV dan poin VI dari Penjelasan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam kedua poin tersebut disebutkan bahwa:

- a. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- b. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) penerapan prinsip- prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai Negara termasuk indoensia, antara

lain disebabkan perusahaan di Negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

c. Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian diluar tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)

d. Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

Tujuan Good Corporate Governance (GCG) di BUMN: Enam tujuan penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memaksimal nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, organ dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan

tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan, termasuk kelestarian lingkungan di wilayah sekitar BUMN

- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional
- f. Menyukseskan program privatisasi.

Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam buku Effendi (2009:4-5) sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut:

1. Transparansi

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian

suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas

kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

4. Pertanggungjawaban

kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

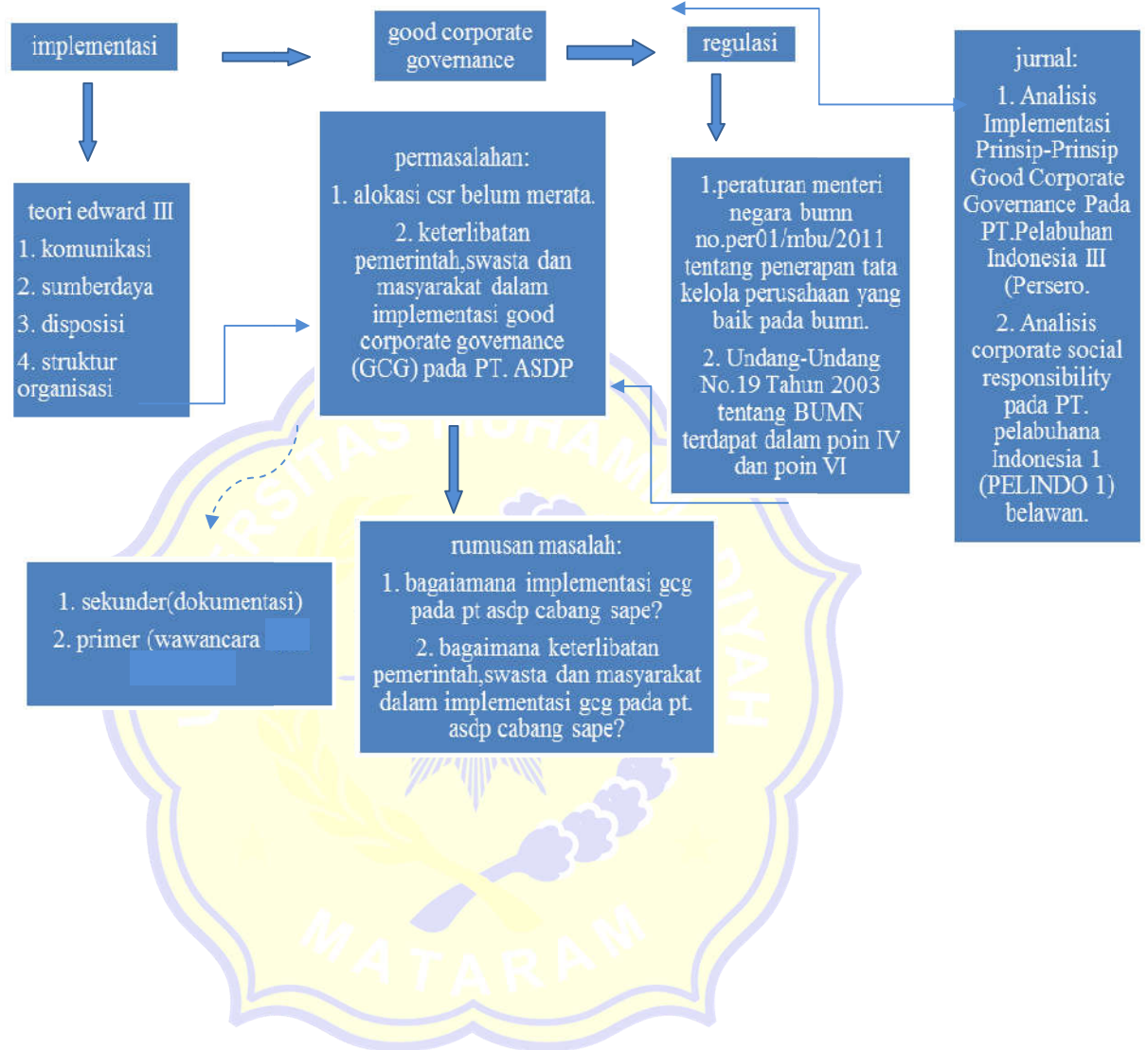
5. Kewajaran

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*). Menurut Djarmar Satori dan Aan Komariah (2013:25) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang terperinci dan relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, pandangan, tindakan sehari-hari, secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Arifin, 2010; 26), pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta berupa dokumen atau perilaku yang diamati.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi *good corporate governance* pada PT. ASDP Indonesia ferry (persero) penyebrangan cabang sape dan keterlibatan 3 (stakeholders) pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi GCG dengan mengacu pada peraturan menteri negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada

Badan Usaha Milik Negara. Sehingga implementasi GCG pada PT. ASDP Cabang Sape dapat berjalan dengan baik.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Penyebrangan Cabang Sape yang berlokasi di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Dan waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan.

3.4 Pemilihan Informan/Narasumber

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka peneliti menggunakan “*Purposive Sampling*” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000: 128). Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah :

Table 3.1 Pemilihan Informan

No.	Nama informan
1.	Manager SDM & Umum Cabang Sape
2.	Pegawai/Staff Umum SDM & Umum Cabang Sape
3.	Masyarakat sekitar lingkungan perusahaan

Sumber: Peneliti 2021

3.5 Sumber Data dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil observasi terhadap situasi sosial peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian, baik wawancara, observasi maupun dokumentasi peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat peneliti adalah data-data dan dokumen perusahaan yang ada hubungannya dengan implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Sape.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu : Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan.
2. Dokumentasi, Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku *Annual Report* dan buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT. ASDP Indonesia Ferry, jurnal , website resmi www.indonesiaferry.co.id dan lain sebagainya.
3. Wawancara, peneliti dengan melakukan tanya jawab kepada responden untuk mengetahui lebih dalam implementasi *good corporate governance*.

3.7 Tehnik Analisa Data

Sugiyono (2008) mengatakan bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi) dan dokumentasi dengan cara menjabarkan ke dalam pola penyusunan dan memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan menyimpulkan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai

tuntas, sehingga datanya sudah ada. Proses analisis data menurut model miles dan huberman yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Miles dan Huberman, 2009).

Langkah - langkah dalam melakukan analisis data:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008: 247). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun (Milles dan Hubberman, 2009:16)

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Hubberman, 2009:18).

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008: 253)

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Uji *Credibility* (Kredibilitas) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah dilakukan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276)

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Pengujian *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah terjun lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Kepastian (Confirmability)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi *standart confirmability*.